

### LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

# **KEPUTUSAN** KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

# NOMOR 94 TAHUN 2014

#### TENTANG

## PENGHARGAAN KEPADA KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH/INSTITUSI TAHUN 2014

### KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Menimbang : a. Bahwa Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi dan Pemberantasan Korupsi Tahun Pencegahan mengamanatkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi untuk melaksanakan pengadaan elektronik pada barang/jasa sepenuhnya secara Pelaksanaan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa;
  - Kementerian/Lembaga/Pemerintah b. Bahwa terhadap telah berupaya melaksanakan Daerah/Institusi vang secara elektronik barang/jasa sepenuhnya pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan apresiasi dalam penghargaan sebagai bentuk pengadaan barang/jasa secara elektronik;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas maka dipandang perlu untuk Kepala Lembaga Kebijakan Keputusan menetapkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penghargaan Kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Tahun 2014:
- Mengingat: 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 157 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah;

- 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah;
- 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN PEMERINTAH BARANG/JASA TENTANG PENGHARGAAN KEPADA KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH/ **INSTITUSI TAHUN 2014.** 

KESATU

penghargaan kepada Kementerian/Lembaga/ Memberikan Pemerintah Daerah/ Institusi yang telah berupaya melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 melalui implementasi pengadaan secara elektronik pada tahun 2014.

KEDUA

Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah / Institusi yang mendapatkan penghargaan atas upayanya melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui implementasi pengadaan secara elektronik pada tahun 2014 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2014

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

#### Tembusan:

- 1. Sekretaris Utama LKPP;
- 2. Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN

KEPALA **LEMBAGA** KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENGHARGAAN

**KEPADA** 

KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH

DAERAH/ INSTITUSI TAHUN 2014

NOMOR TANGGAL

### DAFTAR NAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH/INSTITUSI YANG MENDAPAT PENGHARGAAN DALAM IMPLEMENTASI PENGADAAN SECARA **ELEKTRONIK TAHUN 2014**

No	Nama Instansi	Kategori Penghargaan
1.	<ul> <li>Kementerian Perhubungan</li> <li>Provinsi Kepulauan Riau</li> <li>Provinsi Sulawesi Tenggara</li> <li>Provinsi Nusa Tenggara Barat</li> <li>Kota Jambi</li> <li>Kota Surabaya</li> <li>Kota Balikpapan</li> <li>Kota Kendari</li> <li>Kota Mataram</li> <li>Kabupaten Muko-Muko</li> <li>Kabupaten Badung</li> <li>Kabupaten Maros</li> <li>Kabupaten Malaka</li> <li>Kabupaten Hulu Sungai Tengah</li> </ul>	Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2014 pada Aksi Pelaksanaan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa
2.	<ul> <li>Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> <li>Provinsi Gorontalo</li> <li>Provinsi Papua</li> <li>Kota Subulussalam</li> <li>Kota Banjarmasin</li> <li>Kota Kotamobagu</li> <li>Kota Tangerang</li> <li>Kota Ternate</li> <li>Kabupaten Simeulue</li> <li>Kabupaten Magetan</li> <li>Kabupaten Boalemo</li> <li>Kabupaten Barito Utara</li> <li>Kabupaten Lombok Tengah</li> </ul>	Akselerasi Penerapan e-Procurement Tahun 2014

3.	– Provinsi DKI Jakarta	Kepemimpinan dalam Transformasi
	- Provinsi Kalimantan Tengah	Pengadaan Secara Elektronik
	- Provinsi Aceh	
	– Provinsi Jawa Barat	•

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

AGUS RAHARDJO